



IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN OLEH NOTARIS

Oleh :

A. Rismayana¹, Dwi Haryati², Syamsul Bachri³

INTISARI

Penelitian ini mengenai Implementasi Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Perbankan Oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris terhadap upaya mewujudkan implementasi asas keseimbangan para pihak dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan faktor-faktor yang menjadi parameter bagi notaris terhadap tindakan penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, artinya bahwa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya, Selain itu, penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris terhadap upaya mewujudkan asas keseimbangan para pihak dalam pembuatan akta perjanjian kredit oleh notaris adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit baik secara notariil maupun dalam pelegalisasian akta perjanjian kredit di bawah tangan, notaris selaku pejabat umum berwenang memberikan *advices* hukum atau penyuluhan hukum kepada para pihak, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak demi terwujudnya kesetaraan para pihak. Adapun faktor-faktor yang menjadi parameter bagi notaris terhadap tindakan penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan para pihak adalah apabila salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dari segi ekonomi maupun psikologi sehingga pihak lainnya menyetujui kesepakatan dalam keadaan terdesak dan tertekan.

Kata Kunci : Notaris, Asas Keseimbangan, Akta Perjanjian Kredit Perbankan

¹ Jl. Manggarupi, B/6 Sungguminasa, Kab. Gowa

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES IN THE BALANCE OF THE PARTY MAKING AKTA BANKING CREDIT AGREEMENT BY NOTARY

By :

A. Rismayana⁴, Dwi Haryati⁵, Syamsul Bachri⁶

ABSTRACT

This research is about the implementation of principle balance of the Parties in the Credit Agreement Banking Act Making By Deed. This study aims to identify and analyze the role of the notary to efforts to realize the implementation of the principle of balancing the parties in making the deed of loan agreements, and the factors that become the parameters for the deed against the misuse of state action in the agreement of the parties.

This research is a juridical nature empirical, meaning that the facts found in the field associated with other legal rules, addition, this study also are juridical normative, that is research based on literature research using this approach to the problems investigated by way of reviewing the terms of the legislation in force in Indonesia and other legal materials. Field research (field research) is conducted to obtain primary data, while the research literature conducted to obtain secondary data.

The results showed that the role of the notary to efforts to realize the principle of balancing the parties in making the credit agreement by the notary deed is in the making of the agreement, both credit and in legalized notary deed under the hands of the credit agreement, deed as a public official authorized to provide legal advices or legal counseling to the parties, which explains the rights and obligations of both parties in order to realize equality of the parties. The factors which become the parameters for the deed against the misuse of state action in the agreement of the parties is that if in an agreement, one party has a stronger position in terms of economics and psychology so that the other parties agreed to a deal in a state of urgency and distress. In this case the parties who have a strong bargaining position may take action in the abuse situation.

Keywords: Notary, The principle of balance, Deed of Loan Agreement

⁴ Jl. Manggarupi, B/6 Sungguminasa, Kab. Gowa

⁵ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

⁶ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar



Implementasi asas keseimbangan para pihak dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan oleh notaris

RISMAYA, A, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

